

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang masalah

Agama Islam adalah agama yang komprehensif artinya agama yang memiliki aturan yang menyeluruh mengenai semua aspek kehidupan dari hal yang terkecil sampai yang terbesar, sehingga tidak ada satupun aspek kehidupan yang tidak diatur di dalam agama Islam. Salah satu pilar agama Islam adalah rukun Islam, yang salah satu isinya adalah kewajiban mengeluarkan zakat.

Zakat merupakan ibadah *mahdhoh* yang syarat, rukun, serta caranya telah ditetapkan oleh syariat. Di sisi lain zakat merupakan ibadah yang sangat penting dalam menopang perekonomian umat. Seperti yang dikatakan oleh Didin Hafidhudhin (2008: 1), “Zakat adalah ibadah *maaliyyah ijtima’iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat”. Ibadah *maaliyyah ijtima’iyah* adalah ibadah sosial yang berkaitan dengan kemaslahatan masyarakat sehingga memiliki peran yang sangat penting. Bahkan ketika kekhalifahan Abu bakar, orang yang tidak mau membayar zakat maka mereka diperangi sehingga mau membayar zakat.

Pada awalnya zakat mal hanya terbatas pada harta tertentu saja seperti emas dan perak, namun seiring dengan perkembangan zaman, banyaknya profesi yang memiliki penghasilan yang jauh lebih besar dan produktif seperti

dokter, pengacara, insinyur, professor, dan sebagainya sehingga memunculkan pertanyaan apakah profesi tersebut wajib dikeluarkan zakatnya? Dari permasalahan tersebut timbulah *ijtihad* para ulama kontemporer tentang zakat profesi sehingga memunculkan berbagai argumen mengenai zakat tersebut. Ada kelompok yang mendukung adanya zakat profesi dan ada pula yang menolaknya.

Zakat profesi merupakan jenis zakat yang baru, Para ulama kontemporer yang mulai membahas mengenai zakat ini, namun bukan berarti ulama mujtahid terdahulu belum pernah membahasnya seperti Imam Ahmad bin Hanbal dikisahkan pernah menyewakan rumahnya untuk menghidupi dirinya karena itu ia berpendapat bahwa seorang muslim yang menyewakan rumahnya dan nilai sewa mencapai *nisab*, maka zakatnya harus dikeluarkan tanpa harus menunggu *haul* (satu tahun). Menyewakan rumah di sini dapat dianalogikan dengan menyewakan tenaga atau keahlian. Sebab, menekuni profesi tertentu pada hakikatnya adalah menyewakan keahlian (Setiawan, 2010: 201).

Para ulama telah membahas zakat profesi ini, namun salah satu ulama kontemporer yang banyak menggagas mengenai zakat profesi ini adalah Yusuf Qordhowi. Di Indonesia sendiri banyak para cendekiawan muslim dan ormas Islam yang telah membahas mengenai zakat profesi seperti Didin Hafidhudhin. Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan fatwanya mengenai zakat profesi ini. Hal ini terdapat dalam fatwa MUI nomor 3 tahun 2003 tentang zakat penghasilan bahwa setiap pendapatan seperti gaji,

upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal dan telah mencapai *nisab* satu tahun yakni senilai dengan 85 gram emas wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Salah satu ayat yang dijadikan landasan mengenai zakat profesi ini oleh MUI adalah firman Allah dalam surah al-Baqarah, 1: 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ...

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu...” (Soenarjo. R. H. dkk., 1990: 45).

Walaupun zakat profesi ini telah ditetapkan fatwanya oleh MUI, namun kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak paham mengenai zakat profesi ini pasalnya karena *istinbatul ahkam* (penetapan hukum) yang tidak konsisten dari MUI ini. Para ulama yang lainnya menyatakan bahwa zakat profesi ini dapat dianalogikan kepada berbagai jenis zakat lainnya seperti emas dan perak, zakat *tijarah*, zakat pertanian, dan zakat *rikaz*. Dalam penentuan besarnya zakat profesi yang perlu dikeluarkan pun berbeda pula, sehingga kewajiban zakat profesi ini tergantung tingkat keihsanan *Muzakki* (orang yang mengeluarkan zakat) dalam usaha membersihkan harta yang dimilikinya (Djumhur, dalam Hidayat, 2008: 176).

Organisasi masyarakat Islam (ormas) seperti Persatuan Islam (Persis) menyatakan tidak adanya zakat profesi karena zakat jenis ini tidak pernah ada pada zaman Rasul SAW. Dewan Hisbah Persis sebagai lembaga fatwa dalam ormas tersebut telah menetapkan untuk menolak zakat profesi, dengan alasan

karena zakat termasuk ibadah *mahdhah*. Hal ini terdapat dalam *Kumpulan Keputusan Sidang Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis) tentang Akidah dan Ibadah* (Shalehuddin, 2008: 443). Namun bukan berarti seorang yang memiliki penghasilan dengan jalan suatu profesi terlepas dari pengeluaran sejumlah harta, dalam hal ini Persis mewajibkan untuk mengeluarkan infaq wajib yang besarnya sesuai kebutuhan. Namun dalam hal ini menjadi suatu permasalahan, zakat sendiri merupakan bagian dari infaq yaitu infaq wajib. Sedangkan Persis sendiri mewajibkan pengeluaran infaq ini.

Kalangan ulama Nahdhatul Ulama (NU) memiliki pandangan yang berbeda mengenai zakat profesi ini. Lembaga Bahtsul Masail NU telah menetapkan adanya zakat profesi yang merupakan hasil Keputusan Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama (NU) di asrama Haji Pondok Gede Jakarta yaitu pada tanggal 25-28 Juli 2002 bertepatan dengan 14-17 Rabiul Akhir 1423 Hijriyah. Berikut kutipannya dalam *Ahkamul Fuqaha fi Muqarrarat Mu'tamarat Nahdhatil Ulama*:

“Intinya pada dasarnya semua hasil pendapatan halal yang mengandung unsur *mu'awadhah* (tukar-menukar), baik dari hasil kerja profesional/non-profesional, atau pun hasil industri jasa dalam segala bentuknya, yang telah memenuhi persyaratan zakat, antara lain : mencapai satu jumlah 1 (satu) *nisab* dan niat *tijarah*, dikenakan kewajiban zakat” (Tim PW LTN NU Jatim, 2007: 566).

Keputusan tersebut menyimpulkan bahwa semua hasil usaha (profesi) dikenakan zakat profesi jika diniatkan dengan zakat perdagangan. Namun dalam masalah ini berbeda dengan zakat tijarah yang ditetapkan oleh MUI yang langsung dipotong saat menerima gaji melainkan harus mencapai *nisab* dan *haul*. Niat *tijarah* maksudnya adalah ketika seseorang bekerja, niatnya

adalah melakukan perniagaan. Syarat ini akan sulit dilaksanakan karena agak sulit mengubah niat bekerja demi mendapat upah atau gaji dengan niat berjual beli. Keputusan tersebut memiliki tambahan, "Akan tetapi realitasnya jarang yang bisa memenuhi persyaratan tersebut, lantaran tidak terdapat unsur *tijarah* (pertukaran harta terus menerus untuk memperoleh keuntungan) (Tim PW LTN NU Jatim, 2007: 566)", hal tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum mengenai zakat profesi sulit dilaksanakan sampai terpenuhinya syarat niat *tijarah* tersebut. Tentu saja hal ini menjadi permasalahan yang harus diselesaikan.

Sekilas akan sulit memastikan sikap dari musyarawah ini, apakah menerima zakat profesi atau tidak karena keputusan ini seakan-akan sulit diwujudkan karena tergantung dari niat seseorang ketika bekerja. Akan tetapi, seperti yang diketahui bahwa yang dimaksud dengan zakat profesi yaitu zakat yang dipotong setiap bulan. Dalam pandangan Nahdlatul Ulama, harta tersebut harus sudah dimiliki sama halnya dengan zakat *tijarah*. Hal tersebut memberikan arti bahwa zakat profesi yang dikenakan zakat adalah profesi yang diniatkan *tijarah* sehingga besarnya zakat adalah 2,5% dan telah mencapai *nisab* perniagaan yakni yang setara dengan 85 gram emas.

Kesimpulannya, kedua ormas ini telah mengambil sikap mengenai hukum zakat profesi ini, namun masih terdapat kerancuan hukum di dalamnya. Persis menolak adanya zakat profesi dengan solusi diganti dengan infaq, namun penggunaan istilah ini memiliki banyak arti termasuk bagian dari infaq ini adalah zakat, besarnya infaq yang harus dikeluarkan juga tidak

ditentukan namun berdasarkan kebutuhan yang bersifat abstrak sehingga masih memerlukan penelitian. Begitupun NU yang menyatakan bahwa setiap harta yang diniatkan *tijarah* harus dikeluarkan zakatnya, sementara sulit sekali menemukan pekerjaan dalam profesi tertentu dengan niat *tijarah* ini karena memang bekerja berdasarkan profesi ini bukan suatu perniagaan yang niatnya adalah *tijarah*, melainkan hanya bekerja dengan niat untuk menghasilkan penghasilan. Hal ini menjadi menarik untuk dilakukan penelitian mengenai hal tersebut dikarenakan kedua ormas ini sama-sama memiliki dewan fatwa yang sudah berdiri sejak lama dan tidak diragukan lagi keberadaannya dalam penyelesaian permasalahan hukum.

Keberadaan NU yang sudah berdiri sejak lama yaitu tahun 1926 dan Persis tahun 1923 menjadi ormas yang sudah lama berdiri yang pengikutnya banyak. Bahkan NU menjadi ormas Islam terbesar di Indonesia. Fatwa yang sudah dikeluarkan menjadi pegangan bagi pengikutnya. Dalam hal ini perbedaan pendapat antara kedua ormas ini perlu penelitian. Apakah keduanya bisa kompromikan atau melihat salah satu pendapat yang terkuat atau bahkan keduanya memiliki kelemahan yang harus diperbaiki? Fatwa mengenai zakat profesi juga telah dikeluarkan sejak lama. Bahtsul Masail NU mengeluarkan fatwa tersebut tahun 2002, sama halnya dengan Dewan Hisbah mengeluarkan fatwa tersebut pada tahun yang sama. Namun apakah fatwa tersebut masih relevan dengan perkembangan zaman? Hal ini menjadi sesuatu yang menarik untuk dilakukan penelitian.

Mengingat bahwa zakat profesi ini memiliki potensi yang luar bisa untuk kemaslahatan umat dan kemajuan dalam bidang perekonomian Islam, juga zakat profesi ini adalah suatu permasalahan baru yang memerlukan lapangan *ijtihad* oleh para mujtahid kontemporer ataupun lembaga fatwa maka permasalahan ini memerlukan landasan hukum yang kuat. Ataupun jika zakat profesi ini tidak ada landasan hukumnya dan memang tidak dibenarkan adanya zakat profesi maka bagaimana solusi terhadap permasalahan mengenai profesi yang memiliki potensi yang besar seperti yang sudah disebutkan di atas. Sementara umat Islam terutama umat Islam Indonesia memerlukan kejelasan hukum terhadap permasalahan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut terhadap permasalahan ini.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap lilelatur-litelatur sebelumnya atau yang sering dikenal dengan *literatur review* tidak ditemukan mengenai penelitian zakat profesi berdasarkan keputusan dewan fatwa NU yang diwakili oleh Bahtsul Masail-nya dan Persis melalui Dewan Hisbah-nya. Oleh sebab itu, penyusun tertarik untuk meneliti masalah ini dalam sebuah karya ilmiah atau skripsi dengan mengangkat judul “Hukum Zakat Profesi menurut Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis) dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Supaya penelitian ini dapat mencapai pada sasaran yang diinginkan, maka penulis membatasi pembahasan ini mengenai hukum zakat profesi menurut Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis) dan Bahtsul Masail Nahdatul



Ulama (NU). Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah ini dapat dirumuskan:

1. Bagaimana pendapat Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis) mengenai hukum zakat profesi?
2. Bagaimana pendapat Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU) mengenai hukum zakat profesi?
3. Bagaimana perbedaan dan persamaan Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis) dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama mengenai hukum zakat profesi?

#### **C. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis) mengenai hukum zakat profesi.
2. Untuk mengetahui pendapat Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU) mengenai hukum zakat profesi.
3. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis) dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama mengenai hukum zakat profesi.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

1. Telaah Pustaka

Sebagai rujukan untuk memperdalam penelitian skripsi ini maka perlu melakukan kajian pustaka atau karya-karya penelitian sebelumnya



agar terhindar dari duplikasi penelitian dan memperoleh konsep atau teori komprehensif yang dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan. Oleh karena itu, diperlukan telaah pustaka atau yang sering dikenal dengan *literatur review* dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Dalam penelitian ini, penyusun melakukan penelitian terhadap skripsi, tesis, jurnal, dan literatur-literatur lainnya mengenai zakat profesi agar terhindar dari duplikasi data dan kesamaan penelitian terhadap penelitian sebelumnya juga agar dapat melakukan analisis yang tepat sesuai dengan permasalahan yang berkaitan dengan zakat profesi yang ingin diteliti dan disusun oleh penyusun.

Setelah melakukan penelitian, penyusun menemukan beberapa penelitian mengenai zakat profesi ini yaitu skripsi yang disusun oleh Abdul Haris (UIN Sunan Kalijaga, 1998) dengan judul “*Analisis terhadap Pandangan Yusuf Qordowi tentang haul dalam zakat pendapatan.*” Skripsi ini menjelaskan tentang keberadaan konsep *haul* dalam zakat pendapatan dan menjelaskan pokok-pokok pikiran Yusuf Qordowi dalam kaitannya dengan masalah haul dalam zakat pendapatan. Skripsi ini hanya fokus pada masalah haul zakat profesi dan hanya mengutarakan satu pendapat tokoh.

Dalam Skripsi lain yang disusun oleh Suriadi (UIN Sunan Kalijaga, 2006) dengan judul “*Metode Penetapan Hukum Zakat Profesi terhadap Pemikiran Yusuf Qordowi dan Jalaluddin Rakhmat*” yang menjelaskan tentang penggunaan metode *qiyas* yang dilakukan oleh Yusuf

Qordowi untuk menetapkan hukum zakat profesi dengan alasan praktik *qiyas* terhadap zakat sudah dilakukan oleh sahabat dan tabi'in, berbeda dengan Jalaluddin Rakhmat yang menolak penggunaan *qiyas* dalam penetapan hukum zakat profesi karena adanya kerancuan dalam usul fiqh. Mereka mengajukan beberapa argument dengan landasan yang sama-sama kuat yakni berlandaskan al-Qur'an dan al-Sunnah. Riwayat yang diajukan oleh Yusuf Qordowi lebih banyak kepada sahabat, sedangkan Jalaluddin Rakhmat lebih kepada tabi'in. Dalam skripsi ini menggunakan teori usul fiqh yakni *qiyas* dalam menetapkan hukum zakat profesi tetapi pembahasan secara detail terkait *Ijtihad* dan *turuq al-istinbat* dalam penetapan *nisab* dan jenis profesi yang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat profesi belum dikaji.

Deni Setiawan (2011), dalam sebuah jurnal yang berjudul "*Zakat Profesi Dalam Pandangan Islam*", mengatakan bahwa pada awalnya zakat hanya terbatas pada harta tertentu saja, namun seiring dengan perkembangan zaman, banyaknya profesi yang memiliki penghasilan yang jauh lebih besar dan produktif seperti dokter, pengacara, insinyur, professor, dan sebagainya, sehingga memunculkan pertanyaan apakah profesi tersebut wajib mengeluarkan zakatnya? Dari permasalahan tersebut timbulah *ijtihad* para ulama komtemporer tentang zakat profesi. Meskipun zakat profesi dianggap jenis zakat yang baru, bukan berarti ulama terdahulu tidak pernah membahasnya. Imam Ahmad bin Hanbal, misalnya, dikisahkan pernah menghidupi dirinya dengan menyewakan rumahnya.

Karena itu ia berpendapat bahwa seorang muslim yang menyewakan rumahnya dan nilai sewa mencapai *nisab*, maka ia harus mengeluarkan zakat tanpa perlu menunggu syarat *haul* (satu tahun). Menyewakan rumah di sini dapat dianalogikan dengan menyewakan tenaga atau keahlian. Sebab, menekuni profesi tertentu pada hakikatnya adalah menyewakan keahlian. Jurnal tersebut hanya menjelaskan tentang bagaimana pendapat para ulama salaf dan kontemporer mengenai zakat profesi tetapi tidak menjelaskan metode *istinbath* yang secara terperinci.

Fazlur Rahman (UNISBA, 2012) dalam skripsinya yang berjudul “*Studi Perbandingan Metode Istinbath Hukum Zakat Profesi Di Kalangan Ulama Nahdathul Ulama, Muhammadiyah, Dan Persatuan Islam Jawa Barat*” menjelaskan pendapat ulama-ulama di kalangan ormas Islam tersebut. Skripsi ini hanya menjelaskan bagaimana pendapat ulama-ulama tersebut mengenai zakat profesi, namun tidak menjelaskan metodologi yang mendalam seperti yang dimaksud dalam judul penelitian. Hal ini dapat diketahui dari cara peneliti mengungkapkan pendapat ulama tersebut dengan cara wawancara. Istilah metode *istinbath* hukum tentu saja merupakan metodologi ushul fiqih yang digunakan oleh para ulama tersebut dalam merumuskan hukum zakat profesi. Namun, penulis tidak menemukan hal tersebut sehingga dapat disimpulkan skripsi ini mempunyai kekurangan dalam hal menjelaskan metodologi yang digunakan untuk menentukan hukum zakat profesi.

Skripsi tersebut menjelaskan bahwa ulama dikalangan NU dan Muhammadiyah mengakui adanya zakat profesi sedang ulama Persis tidak mengakui adanya zakat profesi. skripsi ini bersumberkan fatwa ulama-ulama dikalangan ormas tersebut saja namun tidak bersumber langsung kepada fatwa masing masing lembaga fatwa masing-masing ormas. Metode yang digunakan langsung melakukan wawancara terhadap beberapa tokoh dalam ormas tersebut.

Dalam skripsi yang disusun oleh Siti Habibah (UIN Sunan Kalijaga, 2015), dengan judul *“Zakat Profesi Dalam Pemikiran Fiqih Kontemporer (Studi Perspektif Ushul Fiqih)”* menjelaskan tentang bagaimana ulama kontemporer seperti Yusuf Qordowi, Didin Hafidhuddin, dan Jalaluddin Rakhmat menetapkan hukum zakat profesi. Yusuf Qordowi, Didin Hafidhuddin, dan Jalaludin Rakhmat dalam menetapkan hukum zakat profesi, diantaranya adalah perbedaan dalam penggunaan dalil, metode *istinbath* hukum dan juga jenis *ijtihadnya*. Dalam skripsi ini juga dijelaskan tentang bagaimana masing-masing tokoh memahami ayat-ayat dalam al-Qur'an yang ada kaitannya dengan permasalahan zakat, yakni dalam surat al-Baqoroh ayat 267, sehingga dihasilkanlah hukum yang berbeda pula mengenai zakat profesi ini. Skripsi ini hanya menjelaskan beberapa tokoh saja, tidak menjelaskan tokoh yang lainnya.

Secara sederhana telaah pustaka yang berbentuk skripsi ini terdapat dalam tabel berikut.

Tabel 1.1  
Skripsi yang membahas mengenai zakat profesi

No	Penyusun	Judul	Tahun	Universitas	Kesimpulan
1	Abdul Haris	Analisis terhadap Pandangan Yusuf Qordowi tentang haul dalam zakat pendapatan	1998	UIN Sunan Kalijaga	Skripsi ini hanya fokus pada masalah <i>haul</i> zakat profesi menurut Yusuf Qordowi
2	Suriadi	Metode Penetapan Hukum Zakat Profesi terhadap Pemikiran Yusuf Qordowi dan Jalaluddin Rakhmat	2006	UIN Sunan Kalijaga	Skripsi ini menjelaskan penggunaan <i>qiyas</i> dalam menetapkan zakat profesi menurut Yusuf Qordowi dan Jalaluddin Rakhmat
3	Fazlur Rahman	Studi Perbandingan Metode Istibath Hukum Zakat Profesi Di Kalangan Ulama Nahdathul Ulama, Muhammadiyah,	2012	UNISBA	Skripsi ini hanya meneliti pendapat ulama-ulama Nahdathul Ulama, Muhammadiyah, Dan Persatuan Islam Jawa Barat mengenai zakat profesi, namun penelitian ini tidak begitu mendalam

		Dan Persatuan Islam Jawa Barat			mengenai metode <i>istinbath</i> yang digunakan dalam penetapan hukumnya.
4	Siti Habibah	Zakat Profesi Dalam Pemikiran Fiqih Kontemporer (Studi Perspektif Ushul Fiqih	2015	UIN Sunan Kalijaga	Skripsi ini menjelaskan perbedaan dalam penggunaan dalil, metode <i>istinbat</i> hukum dan juga jenis <i>ijtihad</i> yang digunakan para tokoh tersebut dalam menentukan hukum zakat profesi

## 2. Kerangka Teoritik

Hukum diadakan pada dasarnya adalah untuk mencegah kejahatan yang dalam arti lain meraih kemaslahatan. Begitu juga dengan hukum Islam, penetapan hukum Islam selalu mengacu kepada *maslahah*. Tujuan Allah dalam menetapkan hukum adalah *al-maslahah* atau maslahat yaitu untuk memberikan kemaslahatan kepada umat manusia dalam kehidupannya di dunia, maupun dalam persiapannya menghadapi kehidupan akhirat (Syarifuddin, 2014: 231-232). Begitu juga para mujtahid dalam menetapkan hukum Islam selalu mengacu kepada dikenal dengan metode *ijtihad* yang selalu mengacu kepada *maqosid syariah* atau

*masalah* itu sendiri. *Maqosid syariah* pun menjadi suatu faktor yang menyebabkan berubahnya suatu hukum. Pada saat yang sama hukum memakan bangkai di negara yang damai akan berbeda dengan negara yang sedang mengalami perang dan susah akan makanan. Hal tersebut dikarenakan *maqosid syariah* yang berbeda. Hal ini juga berlaku terhadap hukum yang lainnya termasuk hukum zakat profesi.

Metode *ijtihad* yang digunakan dalam penentuan hukum Islam ini selalu mengacu kepada *hadi* yang terkenal yaitu *hadits Muadz bin jabal*, ada tahap-tahap penetapan hukum dalam Islam. Tetapkanlah dalam al-Qur'an. Apabila tidak ada didalamnya maka, carilah dalam al-Sunnah. Apabila tidak ada dalam keduanya, maka gunakanlah *ra'yu* (pendapat). Jadi untuk kasus-kasus baru yang tidak ada rujukannya dalam al-Qur'an dan al-Sunnah, kita boleh mengemukakan pendapat sendiri. Dalam penggunaan *ra'yu* sendiri bukan berarti memakai kemampuan berfikir secara bebas namun tentu saja memiliki aturan tersendiri agar tetap bersandar kepada al-Qur'an dan al-Sunnah.

Penetapan hukum Islam digali dari al-Qur'an dan al-Sunnah. Kedua sumber ini menggunakan bahasa arab sehingga diperlukan pemahaman kebahasaan yang mendalam dalam hal bahasa arab. Amir Syarifuddin (2014, 1-2) mengatakan bahwa metode dan cara memahami, menetapkan, dan mengeluarkan hukum dari sumbernya terdiri dari dua cara:



1. Memahami hukum dari *nash* atau teks *syara'* (al-Qur'an atau sunnah Nabi) secara langsung (tertulis atau terbaca) atau tidak secara langsung (tersirat dibalik apa yang tertulis dan terbaca). Pemahaman *nash* secara tekstual ini disebut menggunakan kaidah kebahasaan (*qawaid lugawiyyah*) atau mengetahui arti teks.
2. Memahami hukum tidak dari *nash syara'*, baik yang tertulis secara langsung maupun tidak, tetapi dari jiwa *nash syara'* itu yang mana jiwa *nash* itu dapat diketahui dari maksud Allah dalam menetapkan hukum yang terkandung dalam teks hukum tersebut. Metode ini disebut metode kaidah makna (*qawaid maknawiyah*).

Kaidah pemahaman lafadz arab itu mencakup empat segi pokok pembahasan:

1. Pemahaman lafadz dari segi arti dan kekuatan penggunaannya terhadap maksud kehendak Allah yang terdapat dalam lafadz itu.
2. Pemahaman lafadz dari segi penunjukannya terhadap hukum.
3. Pemahaman lafadz dari segi kandungannya terhadap satuan pengertian (*afrad*) dalam lafadz itu.
4. Pemahaman lafadz dari segi bahasa yang digunakan dalam menyampaikan tuntutan hukum (*taklif*) (Syarifuddin, 2014: 3).

Al-amidi (dalam Syarifuddin, 2014: 191-191) membagi dalil kepada dua kelompok yaitu:

*Pertama*, dalil yang sah menurut dirinya dan dan wajib diamalkan, terdiri dari:

1. Dalil yang disampaikan Nabi dalam bentuk yang terbaca, yaitu al-Qur'an.
2. Dalil yang disampaikan Nabi dalam bentuk yang tak terbaca, yaitu Sunnah. Al-Qur'an dan al-Sunnah disebut dalil *nash*.
3. Dalil yang tidak disampaikan oleh Nabi atau bukan *nash*; bentuknya terdiri dari:
  - a. Terpelihara dari kesalahan yaitu *ijma*;
  - b. Tidak terpelihara dari kesalahan tetapi dapat dihubungkan kepada *nash*, yaitu *qiyas*;
  - c. Tidak terpelihara dari kesalahan dan tidak pula dihubungkan kepada *nash*, yaitu *istidlal*;

kedua, sesuatu yang diperkirakan dalil sahih, sebenarnya bukan dalil yaitu: *syar'u man qablana*, *madzhab sahabi*, *istihsan* dan *maslahah mursalah*.

*Ijtihad* menjadi langkah yang harus ditempuh jika permasalahan tidak bisa ditemukan dalam al-Qur'an dan al-sunnah. Terutama pada masalah kontemporer pada zaman sekarang ini perlu dilakukan *ijtihad*. Pengertian *ijtihad* seperti yang di jelaskan oleh Imam al-Syaukani (dalam Syarifuddin, 2014: 258) yaitu:

بَذْلُ الْوُسْعِ فِي نَيْلِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ عَمَلِيٍّ بِطَرِيقِ الْإِسْتِنْبَاطِ

“Mengerahkan kemampuan dalam memperoleh hukum syar'i yang bersifat amali melalui cara istinbath”

Berdasarkan keterangan tersebut *ijtihad* dilakukan pada hukum *syara'* yang bersifat *amali*, maka tidak sah *ijtihad* pada hukum selain itu misalkan masalah tauhid. Secara hakikat dari *ijtihad* itu sebagai berikut:

- a. *Ijtihad* adalah pengerahan daya nalar secara maksimal.
- b. Usaha *ijtihad* dilakukan oleh orang yang telah mencapai derajat tertentu di bidang keilmuan yang disebut *faqih*.
- c. Produk atau yang diperoleh dari usaha *ijtihad* itu adalah dugaan kuat tentang hukum *syara'* yang bersifat *amaliyah*.
- d. Usaha *ijtihad* ditempuh melalui usaha-usaha *ijtihad* (Syarifuddin, 2014: 260)

Macam-macam *ijtihad* ditinjau dari segi metodenya, sebagaimana yang dirumuskan ad-Dawuailibi (dalam Dahlan, 348-349: 2010), *ijtihad* dapat dibagi menjadi kepada 3 macam yaitu:

- a. *Al-ijtihad al-bayani*, yaitu suatu kegiatan *ijtihad* yang bertujuan untuk menjelaskan hukum-hukum *syara'* yang terdapat dalam nash al-Qur'an dan al-Sunnah.
- b. *Al-ijtihad al-qiyasi*, yaitu kegiatan *ijtihad* untuk menetapkan hukum-hukum *syara'* atas peristiwa-peristiwa hukum yang tidak ada nash al-Qur'an maupun Haditsnya, dengan cara mengqiyaskanya kepada hukum-hukum *syara'* yang ada nash-nya.
- c. *Al-ijtihad al-istilahi*, yaitu suatu kegiatan *ijtihad* untuk menetapkan hukum *syara'* atas peristiwa-peristiwa hukum yang tidak ada nashnya,

baik dari al-Qur'an maupun Hadis, melalui cara penalaran berdasarkan prinsip *al-istishlah* (kemaslahatan).

Adapun ditinjau dari segi jumlahnya orang yang melakukan *ijtihad* (mujtahid), *ijtihad* dapat dibagi menjadi dua bagian.

- a. *Ijtihâd fardî*, yaitu *ijtihad* yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang untuk menemukan hukum syara' dari suatu peristiwa hukum yang belum diketahui ketentuan hukumnya.
- b. *Ijtihad jama'i* yaitu kegiatan *ijtihad* yang dilakukan oleh seluruh mujtahid untuk menemukan hukum suatu peristiwa yang terjadi, dimana *ijtihad* ini menghasilkan kesepakatan bersama. *ijtihad* model inilah yang disebut dengan *Ijma Ulama*.

Salah satu bagian dari *ijtihad* ini adalah *qiyas*. *Qiyas* sebagai salah satu metodologi dalam menetapkan hukum Islam menjadi metode yang banyak digunakan oleh para Imam Madzhab. Dalam hal penggunaan *qiyas* ada yang mengatakan *qiyas* sebagai dalil hukum syara', mereka merujuk kepada hadits muadz bin jabal. Ada juga yang mengatakan bahwa *qiyas* adalah metode *ijtihad* seperti yang dikatakan oleh imam syafii (tt: 477)

فما القياس؟ ا هو الاجتهاد؟ ام هو مفترقان؟

قلت هما اسمان لمعنى واحد

"Apa yang dimaksud dengan *qiyas*? Apakah *qiyas* itu *ijtihad* atau keduanya adalah sesuatu yang berbeda? Saya (Imam Syafi'i) menjawab keduanya adalah dua nama dengan satu makna"

Berdasarkan hal tersebut bisa disimpulkan yang dimaksud dengan *qiyas* adalah ijtihad itu sendiri sehingga *qiyas* merupakan metode ijtihad. secara etimologi *qiyas* adalah pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan yang lainnya (Syafe'i, 2010: 86). Sedangkan menurut istilah seperti yang diungkapkan oleh Imam Gozali (2010: 299) dalam kitab *al-mustashfa* yaitu:

حَمْلُ مَعْلُومٍ عَلَى مَعْلُومٍ فِي اثْبَاتِ حُكْمٍ لَهُمَا أَوْ نَفْيِهِ عَنْهُمَا بِأَمْرِ جَامِعٍ  
بَيْنَهُمَا مِنْ اثْبَاتِ حُكْمٍ لَهُمَا أَوْ نَفْيِهِ عَنْهُمَا

“Menangguhkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal penetapan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama dari keduanya, dalam penetapan hukum atau peniadaan hukum”

Adapun unsur-unsur pokok dalam *qiyas* adalah sebagai berikut.

1. *Ashl* (pokok) yaitu suatu peristiwa yang sudah ada *nashnya* yang dijadikan tempat meng*qiyaskan*. Ini berdasarkan pengertian *ashl* menurut *furuq*.
2. *Furu'* (cabang) yaitu peristiwa yang tidak ada *nashnya* *furu'* itulah yang dikehendaki untuk disamakan hukumnya dengan *ashl*.
3. Hukum *ashl*, yaitu hukum *syara'* yang ditetapkan oleh *nash*.
4. *Illat*, yaitu suatu sifat yang terdapat dalam *ashl*. Dengan adanya sifat itulah, *ashl* mempunyai suatu hukum dan dengan sifat itu pula, terdapat cabang, sehingga hukum cabang itu disamakanlah dengan hukum *ashl*.

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencari data-data yang berkaitan dengan peneletian ini. Semoga dengan adanya kerangka teoretik di atas dapat memecahkan problematika permasalahan sesuai dengan harapan.

## E. Metode Penelitian

Metode yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah *library research* yaitu penelitian yang menggunakan karya-karya ilmiah seperti buku, jurnal, fatwa, skripsi dan lain sebagainya sebagai sumber datanya, yang memiliki relevansi dengan materi penelitian.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-komparatif*, yaitu berusaha menggambarkan secara sistematis bagaimana wacana hukum zakat profesi dari kedua ormas Islam, untuk kemudian diarahkan kepada bentuk perbandingan.

### 3. Pendekatan penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan *normative-yuridis*, yaitu pembahasan yang berdasarkan pada teori-teori dan konsep-konsep hukum Islam, seperti teori *qiyas* dan *maqasid syari'ah* yang terdapat dalam ilmu Ushul fiqh.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian kepustakaan ini, penyusun melakukan pelacakan terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan materi pembahasan ini yang dapat dikategorikan sebagai berikut:

##### a. Data primer

Data primer yang menjadi acuan penyusun adalah dengan mencari dan menghimpun pengetahuan ilmiah yang berkaitan dengan zakat profesi dalam hal ini adalah pendapat ormas Islam. Data primer yang digunakan al-Qur'an dan al-Sunnah. Sedangkan sumber primer mengenai zakat profesi yang kaitannya dengan NU dan Persis yaitu *Ahkamul Fuqaha fi Muqarrarat Mu'tamarat Nahdhatil Ulama* sebagai kumpulan fatwa Bahstul Masail NU dan *kumpulan keputusan sidang dewan hisbah pesatuan islam (persis) tentang akidah dan ibadah* sebagai kumpulan fatwa dewan hisbah Persis.

##### b. Data sekunder

Data sekunder yang penyusun gunakan adalah berupa karya-karya ilmiah seperti buku, skripsi, jurnal, ceramah keagamaan, majalah, dan tulisan-tulisan dalam media elektronik (internet) yang berkaitan dengan materi pembahasan ini.

#### 5. Analisis Data

Dalam hal ini penyusun akan menggunakan analisis perbandingan, dimana akan membandingkan pendapat NU dan Persis. Pada dasarnya analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan kategorisasi dan



klasifikasi, perbandingan, dan pencarian hubungan antara data yang secara spesifik tentang hubungan antar peubah. Pada tahap pertama dilakukan seleksi data yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan menurut kategori tertentu (Bisri: 2016, 66).

Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (1987: 257) menjelaskan bahwa "*Analysing* meliputi penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan." Dalam menganalisis dan menginterpretasikan data yang telah terkumpul, penyusun menggunakan cara berfikir komparasi. Anton Bakker dan Achmad Charis Zubar (1992 : 71) menjelaskan bahwa "komparasi yaitu membandingkan sebuah pendapat dengan pendapat yang lain tentang hal yang sama (hukum zakat profesi), baik yang memiliki nuansa pemikiran yang hampir sama atau bahkan yang sangat bertentangan." Dalam penelitian ini, Pendapat NU dikomparasikan dengan pendapat Persis, sehingga dapat diketahui persamaan maupun perbedaan pendapat keduanya dan dapat ditarik suatu kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang diteliti. Dalam penelitian ini data diklasifikasikan menjadi dua jenis:

- a. Pandangan atau pemikiran kedua ormas Islam (NU dan Persis), kedua jenis data tersebut dipandang sebagai hasil pemahaman dalam memaknai zakat profesi.
- b. Kemudian dilakukan perbandingan unsur-unsur persamaan dan perbedaan substansi dan metodologi kedua pandangan dalam mengkaji zakat profesi.